PERAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPSI
MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA
CARAWALI

Muh.Yusril Nurdin

Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Muhammadyusrilnurdin11@gmail.com

Abstrac

Perencanaan pembangunan adalah proses pengembangan kinerja masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilakukan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat didalam pembangunan desanya seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, penghasilan, komunikasi dan kepemimpinannya. Pemimpin masyarakat di desa merupakan orang terdepan dalam menggerakkan, menuntun dan mempengaruhi masyarakat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan tercapainya tujuan bermasyarakat secara maksimal dengan memaksimalkan partisipasi seluruh anggota masyarakatnya. Dengan demikian gaya kepemimpinan yang baik itu adalah yang mampu mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab pada masyarakat, tanpa mengurangi partisipasi dan tanggung jawab kepada masyarakat lainnya.

Kata Kunci : Pemerintah, Peranan dan Desa

Pendahuluan

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Agar program pemerintah efektif maka perlu adanya manajemen pemerintahan dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih baik, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan desa memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat

sendiri pun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.(Ahmad Mustanir, Fitriani, et al., 2020)

Pembahasan

Pemerintah Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan pemerintah tentang desa nomor 43 Tahun 2014, merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju development community yakni bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independen community sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri.(Ahmad Mustanir & Darmiah, 2016).

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan , yang dipimpin oleh kepala desa. (A Mustanir et al., 2019)

Perencanaan pembangunan adalah proses pengembangan kinerja masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Berdasarkan Undang-Undang. No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilakukan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun tingkat daerah. (Anggara & Sumantri, 2016)(Kajian et al., 2021).

Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi dalam (Mustanir, Abadi, and Nasri 2016) (Latif et al. 2019) bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi social pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi(Ahmad Mustanir, Fitriani, et al., 2020).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat didalam pembangunan desanya seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, penghasilan, komunikasi dan kepemimpinannya. Pemimpin masyarakat di desa merupakan orang terdepan dalam menggerakkan, menuntun dan mempengaruhi masyarakat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan tercapainya tujuan bermasyarakat secara maksimal dengan memaksimalkan partisipasi seluruh anggota masyarakatnya. Dengan demikian gaya kepemimpinan yang baik itu adalah yang mampu mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab pada masyarakat, tanpa mengurangi partisipasi dan tanggung jawab kepada masyarakat lainnya. Pemerintahan desa harus mampu mempengaruhi masyarakatnya agar bersedia berpartisipasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Latif et al., 2019).

Dalam upaya pembangunan diperlukan adanya bentuk partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaannya sampai pada proses pelaksanaannya, sehingga pembangunan desa tersebut menyentuh segala kebutuhan masyarakatnya. Kadangkala pembangunan desa itu terhambat akibat masalah yang ditimbulkan oleh partisipasi masyarakat desa tersebut. Masyarakat

Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiapan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Motivasi sangat diperlukan dalam kegiatan/proses belajar, maka tidak akan mungkin melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Oleh karena itu, motivasi diperlukan dalam menentukan kegiatan belajar yang intens bagi para anak didik. Karena motivasi menurut Sardiman (2006) adalah daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan partisipasi menurut Newstrom (2004) adalah keterlibatan mental dan emosional dari orang dalam situasi kelompok. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah. (A Mustanir et al., 2019)

Musyawarah Pembangunan

Di Kabupaten Sidenreng Rappang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan cara pemerintah daerah menyusun rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang.

Musrenbang merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “top down” dengan “bottom up” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis. Musrenbang adalah wahana publik yang penting untuk membawa stakeholder memahami

isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah.

Musrenbang dilaksanakan baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kabupaten. Walaupun selama ini hasil dari forum tersebut di beberapa daerah tidak bisa diimplementasikan dan formalitas saja. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih cenderung menjadi retorika. Perencanaan pembangunan didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasi sangat minim. (Ahmad Mustanir & Abadi, 2017)

Berdasarkan pengertian pengelolaan yang telah dikemukakan oleh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah kegiatan mengubah keadaan tertentu sehingga diharapkan dapat lebih berkembang melalui proses-proses atau usaha-usaha memantapkan jalur perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, bahkan pengendalian dengan maksud untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya, lebih sesuai dan lebih berkembang dengan sempurna dan lebih bermanfaat. Disamping itu, dapat pula diketahui bahwa pengelolaan tak lain adalah manajemen dengan berbagai fungsi manajemen. (Ahmad Mustanir & Jusman, 2016)

The issue that is currently developing about local food is that food production and people's interest in consuming local food are very low. If this continues, then the deterioration of local food cannot be avoided. (et al., 2019)

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Mardikanto & Poerwoko, 2015). Sedangkan Verhangen dalam (Mardikanto &

Poerwoko, 2015) (Irwan et al. 2019) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.(Ahmad Mustanir, Fitriani, et al., 2020)

The research method employed was descriptive quantitative. It used Random Sampling technique with a total sample of 96 respondents. Data collection techniques employed were observation, questionnaire, and documentation [1] [2]. Data analysis were by presenting data for each variable under study, performing calculations to answer the problem statements. The results of analysis employed quantitative descriptive techniques with frequency tables and used scale as a measuring instrument. The collected data employed analysis with SPSS 16.0 for Windows.(Ahmad Mustanir, Jermisittiparsert, et al., 2020)

Society is a group of people that unified feelings due to their sharing of identity, interests, feeling of possession, and, usually, living place.(Ahmad Mustanir & Lubis, 2017)

According to Sumpeno (Mustanir, Abadi, & A, Edvances in Sosial Science, Education and Humanities Research, 2017) Deliberation of development planning is a joint community development planning that is a guide or model of village development that focuses on community participation in the overall development process(Mustanir & Abadi, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017).(Ahmad Mustanir et al., 2018)

This study was conducted by using descriptive explanatory research. It was a combination of descriptive research and explanatory research. Keith Punch [5], stated that A descriptive sets out to collect, organize and summarize information about the matter being studied while an explanatory study is on the other hand, sets out to explain and account for the descriptive

information. Description is a more restricted purpose than explanation.(Ahmad Mustanir, Ali, et al., 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Kajian, J., Pendidikan, P., Pemerintahan, I., Muhammadiyah, U., & Rappang, S. (2021). *PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat . yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses.* 9(2), 5–8.
- Kholifah R, E., & Mustanir, A. (2019). *Food Policy and Its Impact on Local Food.* October, 27–38. <https://doi.org/10.32528/pi.v0i0.2465>
- Latif, A., Mustanir, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 144–164. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>
- Mustanir, A, Dema, H., Syarifuddin, H., & ... (2019). Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *JCG: Jurnal Clean ...*, 2(1), 27–39. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/212>
- Mustanir, Ahmad, & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636>
- Mustanir, Ahmad, Ali, A., Yasin, A., & Budiman, B. (2020). *Transect on Participatory*

Development Planning in Sidenreng Rappang Regency. 250–254.

<https://doi.org/10.4108/eai.25-10-2019.2300523>

Mustanir, Ahmad, & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten

Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://journal.uin->

<http://journal.uin->

<http://journal.uin->

Mustanir, Ahmad, Fitriani, S., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran

Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di

Kabupaten Sidenreng Rappang (The Synergy of Village Government's Role and

Community Participation in the Process of Development Planning in Sidenreng Rappang D.

Journal of Government Science (GovSci), 2020(2), 84–108.

Mustanir, Ahmad, Jermisittiparsert, K., Ali, A., Hermansyah, S., & Sakinah, S. (2020). *Village*

Head Leadership and Bureaucratic Model Towards Good Governance in Sidenreng

Rappang. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2291532>

Mustanir, Ahmad, & Jusman. (2016). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan

Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten

Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 13(3), 542–558. <https://e-jurnal.stienobel->

<https://e-jurnal.stienobel->

<https://e-jurnal.stienobel->

Mustanir, Ahmad, Justira, N., Sellang, K., & Muchtar, A. I. (2018). Democratic Model On

Decision-Making At Deliberations Of Development Planning. *International Conference on*

Government Leadership and Social Science (ICOGLASS). Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement, April, 110 – 115.

https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning

Mustanir, Ahmad, & Lubis, S. (2017). *Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning*. 163(Icodag), 316–319. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>